

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



DINAS PARIWISATA
KOTA BIMA

TAHUN 2018-2023

	DAFTAR ISI	
	BAB I	
	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	1
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
	BAB II	
	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	14
	BAB III	
	PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	18
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	19
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	22
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	33
	BAB IV	
	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	40
	BAB V	
	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
	BAB VI	
	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
	BAB VII	
	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
	BAB VIII	
	PENUTUP	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan Pembangunan Nasional dalam semangat desentralisasi dan reformasi saat ini, dan sebagai implikasinya telah menimbulkan berbagai perkembangan yang begitu cepat dan dampak yang begitu dinamis dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan yang demikian itu, maka tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas, percepatan dan pemenuhan pelayanan oleh pemerintah semakin meningkat, terutama kebutuhan akan penyediaan program dan kegiatan pembangunan yang menyentuh kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupannya seiring dengan perkembangan lingkungan, baik lingkungan regional maupun lingkungan global, dan dalam kaitannya dengan itu maka perencanaan yang integral dan komprehensif mutlak diperlukan.

Sebagai lembaga teknis yang diberi amanat untuk merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2008, maka Dinas Pariwisata senantiasa dituntut untuk siap dengan langkah-langkah pembenahan diri serta arah kebijakan secara instansional yang berorientasi ke depan, guna menjawab dan mengakomodir tuntutan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata ini sangat diperlukan, sehingga dengan dokumen RENSTRA yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Bima ini, akan memberikan tuntunan bagi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata sebagai pelaksana teknis kegiatan kepariwisataan dan kepemudaan dan olahraga khususnya dalam periode 5 tahun ke depan (2018-2023).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178));

22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor);
29. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor);

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Pariwisata tahun 2018-2023 ini adalah:

1. Untuk menjadi pedoman yang memberikan arahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan kepariwisataan, kepemudaan dan olah raga dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata (DISPAR) selama 5 (lima) tahun ke depan.

2. Untuk menjadi pedoman yang memberikan arahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan oleh unit organisasi dalam Dinas Pariwisata (DISPAR) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan dalam unit organisasi Dinas Pariwisata (DISPAR).
4. Untuk menjadi acuan dan standar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata (DISPAR) baik Laporan Tahunan maupun Laporan Lima Tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan tentang tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), maka sistematika penyajian Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Bima Tahun 2018-2023 ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pariwisata Kota Bima adalah unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota Bima dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pariwisata (DISPAR) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis ;
- b. Pemberian pelayanan umum ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, pemuda dan olah raga daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut.

A. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dinas,
 - b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkup dinas,
 - c. Penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan,
 - d. Penyiapan dan koordinasi rencana anggaran dan belanja dinas,
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan,
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pada Sekretariat terdapat 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dalam pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan dan melakukan

penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penataan organisasi Dinas;

- b. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitas teknis dan laporan yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengendalian dalam program dan penyusunan laporan;
- c. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Badan.

B. Bidang Pengembangan Destinasi

1. Bidang Pengembangan Destinasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala dinas dalam pembinaan, pengembangan, pemanfaatan obyek wisata, sarana dan prasarana sumber daya pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan serta pemeliharaan dan pengelolaan serta monitoring dan evaluasi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan, serta pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata;
 - b. Penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan, serta pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata;
 - c. Pelaksanaan administrasi Bidang pengembangan destinasi;
 - d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan, serta pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata;
 - e. Pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata dan pengembangan serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
 - f. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan, serta pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata;
 - g. Koordinasi dan konsultasi dalam optimalisasi pendapatan asli daerah atas pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata aset pemerintah daerah dan aset swasta;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada Bidang Pengembangan Destinasi terdapat 3 (tiga) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pengembangan Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan objek daya tarik wisata.

- b. Seksi Pemeliharaan, Pengelolaan Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeliharaan, pengelolaan destinasi dan objek daya tarik wisata.
- c. Seksi Pengendalian Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian destinasi dan objek daya tarik wisata.

C. *Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.*

1. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang *Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar ekonomi kreatif dan pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata lokal, regional, nusantara bahkan mancanegara;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, ekonomi kreatif pengembangan segmen pasar personal, bisnis, pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata lokal, regional, nusantara bahkan mancanegara;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, ekonomi kreatif pengembangan segmen pasar personal, bisnis, pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata lokal, regional, nusantara bahkan mancanegara;
 - d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreatif di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, ekonomi kreatif pengembangan segmen pasar personal, bisnis, pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata lokal, regional, nusantara bahkan mancanegara;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, ekonomi kreatif pengembangan segmen pasar personal, bisnis, pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata lokal, regional, nusantara bahkan mancanegara;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, ekonomi kreatif pengembangan segmen pasar personal, bisnis, pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata lokal, regional, nusantara bahkan mancanegara;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3. Pada Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 (tiga) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Penguatan Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan strategi pemasaran dan promosi.
 - b. Seksi Kerja sama Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama pariwisata.
 - c. Seksi Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif.

D. Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata

- 1. Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang program pengembangan industri pariwisata, hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi.
- 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang program pengembangan industri pariwisata, hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang program pengembangan industri pariwisata, hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
 - c. Mengumpulkan, mengolah dan mengajukan data yang berkaitan dengan industri pariwisata, kelembagaan kepariwisataan;
 - d. Menyiapkan data yang menyangkut usaha jasa pariwisata sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - e. Memantau, evaluasi, pengawasan pengendalian dan penertiban terhadap usaha jasa pariwisata sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Menyiapkan regulasi di bidang industri pariwisata dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang program pengembangan industri pariwisata, hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan

- sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang program pengembangan industri pariwisata, hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata terdapat 3 (tiga) Seksi, yaitu:
- a. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri pariwisata.
 - b. Seksi Kelembagaan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pariwisata.
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

E. Bidang Pemuda dan Olahraga

1. Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program, kegiatan penyebarluasan informasi, koordinasi kelembagaan guna pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan serta menggali dan mengembangkan potensi – potensi daerah terkait bakat keolahragaan pemuda;
 - b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan kepemudaan dan mendorong terbentuknya organisasi kepemudaan yang handal;
 - c. Pengembangan bidang olahraga sehingga diharapkan terbina bibit – bibit unggul daerah;
 - d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan manajemen organisasi dan kelembagaan kepemudaan;
 - e. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bantuan yang meliputi perolehan, pemanfaatan dalam rangka menunjang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - f. Penyelenggaraan pelatihan tenaga-tenaga pelatih yang handal di bidang olahraga;
 - g. Penyediaan bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan olahraga dan kepemudaan;

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
- 3. Pada Bidang Pemuda dan Olahraga terdapat 3 (tiga) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pembinaan Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pembinaan pelaksanaan kepemudaan termasuk pengembangan terhadap pemuda-pemuda berprestasi.
 - b. Seksi Pembinaan Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pembinaan pelaksanaan keolahragaan termasuk pengembangan terhadap olahragawan – olahragawan yang berprestasi.
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga.

2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pariwisata;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengembangan Destinasi, terdiri dari:
 - (i) KASI Pengembangan Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata;
 - (ii) KASI Pemeliharaan, Pengelolaan Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata;
 - (iii) KASI Pengendalian Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata.
 - b. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
 - (i) KASI Penguatan Strategi Pemasaran dan promosi Pariwisata;
 - (ii) KASI Kerja Sama Pariwisata;
 - (iii) KASI Ekonomi Kreatif.
 - c. Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata, terdiri dari:
 - (i) KASI Pengembangan Industri Pariwisata;
 - (ii) KASI Kelembagaan Pariwisata;
 - (iii) KASI Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
 - d. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - (i) KASI Pembinaan Kepemudaan;
 - (ii) KASI Pembinaan Keolahragaan;
 - (iii) KASI Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan Olahraga.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Hingga Bulan Desember 2018, pegawai yang ada berjumlah 34 orang, dengan rincian sebagai berikut.

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	S2	5	11,11%
2.	S1	23	66,67%
3.	Diploma 3	3	11,11%
4.	SMA / sederajat	3	11,11%
Total		34	100%

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	4	13,89%
2.	Golongan III	25	63,89%
3.	Golongan II	5	22,22%
4.	Golongan I	-	-
Total		34	100%

c. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	0	2,78%
2.	Eselon III	5	13,89%
3.	Eselon IV	15	41,67%
4.	Non-Eselonering	14	41,67%
Total		34	100%

2.2.2. Sumberdaya Aset/Modal

Dinas Pariwisata Kota Bima terletak di Jalan Soekarno-Hatta Kecamatan Raba Kota Bima. Kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan yang belum ada sehingga tidak mendukung kelancaran operasional tugas kedinasan pun belum tercapai.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata (DISPAR) Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
- Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet, dan mesin faksimili;

- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis perencanaan, dilengkapi dengan ketersediaan printer, plotter, dan server;
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, mesin tik, dan LCD proyektor;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemari es, *air conditioner* (AC), *dispenser*, kipas angin, dan televisi;
- f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata (DISPAR) Kota Bima merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat *techno structure*, oleh karena itu lembaga ini berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah lainnya, Lembaga terkait non pemerintah, serta seluruh Stake Holders lain yang ada.

Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka Dinas Pariwisata (DISPAR) Kota Bima melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui :

- 1) monitoring dan evaluasi,
- 2) melaksanakan perencanaan teknis kegiatan dinas,
- 3) mengadakan koordinasi dan kerjasama kepariwisataan, pemuda dan olahraga,
- 4) menyusun data statistik kunjungan, sarana dan prasarana pariwisata, pemuda dan olahraga kegiatan penunjang (akomodasi, transportasi, sanggar seni, tempat pertunjukan, kuliner serta citus budaya) sebagai penyedia informasi,
- 5) menyusun dokumen perencanaan pariwisata, pemuda dan olahraga,
- 6) mengadakan sosialisasi dan diseminasi produk perencanaan kepariwisataan, pemuda dan olahraga
- 7) Memprakarsai pembentukan kelompok dan asosiasi masyarakat dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga,
- 8) menyusun dan menyediakan laporan hasil-hasil kegiatan teknis kepariwisataan, pemuda dan olah raga.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata (DISPAR) memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

2.4.1. Hambatan

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.
- b. Masih adanya sikap arogansi dan apriori pelaku birokrasi terhadap partisipasi publik.
- c. Masih adanya pemahaman yang kurang terhadap makna desentralisasi maupun demokratisasi
- d. Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri.
- e. Masih adanya tekanan-tekanan politik dalam pengambilan keputusan bidang perencanaan dan penganggaran sehingga mengganggu tahapan dan proses perencanaan pembangunan.
- f. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan dan kegiatan teknis pembangunan kepariwisataan, pemuda dan olah raga yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.

2.4.2. Tantangan

Adapun beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik.
- b. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
- c. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/ swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
- d. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kota Bima
- e. Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya.

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata
Kota Bima

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20-)
1.	PDRB sector pariwisata	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17
2.	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
3.	Persentase cabor yang meraih medali di tingkat propinsi dan nasional	25	25	25	25	25	30	30	35	25	25	30	30	35	25	25	30	30	35

Analisis Renstra Kementerian/lembaga (K/L) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah

No	Indikator kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD	Sasaran Renstra OPD Provinsi	Sasaran Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PDRB sektor pariwisata	Meningkatnya PDRB sektor pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat
2.	persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi relative stagnan	Sosialisasi RTRW
3.	persentase cabor yang meraih medali di tingkat propinsi dan nasional	Meningkatnya prestasi olahraga	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan tanggungjawabnya terhadap kompleksitas pembangunan daerah yang semakin beragam, Dinas Pariwisata (DISPAR) Kota Bima didalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pengembangan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga;
Data dan informasi merupakan salah satu elemen vital guna mendukung kegiatan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah, kekurangan dan keterbatasan data dan informasi perencanaan yang ada pada tahun-tahun sebelumnya diharapkan menjadi pertimbangan dan bahan masukan penting demi penyediaan dan penyempurnaan data-data pendukung yang diperlukan dalam perencanaan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga.
2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Dinas Pariwisata Kota Bima.
Dinas Pariwisata Kota Bima harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kota Bima seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, *NGO*, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Dinas Pariwisata Kota Bima.
3. Belum optimalnya pelayanan prima di bidang Kepariwisataaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Bima.
Sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik di bidang Kepariwisataaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Bima, maka sudah tentu Dinas Pariwisata Kota Bima harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Dinas Pariwisata Kota Bima.

4. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana kegiatan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga Kota Bima.
Keberadaan aparatur perencana khususnya pada Dinas Pariwisata Kota Bima merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan kepariwisataan, Kepemudaan dan olahraga, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang perencanaan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga.
5. Belum adanya tenaga fungsional perencana dan peneliti bidang Kepariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Kota Bima yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.2.1. Visi

Visi Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah :

"Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri".

Visi tersebut diatas memiliki makna sebagai berikut :

Bagian Pertama : ***Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA***

- a. **Kota Bima yang Berkualitas** adalah terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.
- b. **SETARA** adalah akronim dari kata Sejahtera, Transparan, Akuntabel, Ramah dan Agamais. dengan demikian, pengertian dari masing-masing kata tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Masyarakat **Sejahtera** adalah suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal;
- **Transparan** adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah;
- **Akuntabilitas** adalah proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel akan diwujudkan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Sungguh-sungguh Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Meningkatkan Nilai-nilai Efektif, Efisien dan Partisipatif;
- Lingkungan Perkotaan yang Ramah adalah lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.
- Masyarakat Agamais adalah masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama.

Bagian Kedua : ***menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri***

Pengertian kalimat Visi pada bagian Kedua merupakan bagian dari pernyataan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 sebagaimana telah disebutkan diatas. Oleh karenanya pengertian kalimat visi pada bagian kedua tidak dapat dipisahkan dari dokumen RPJPD Kota Bima tersebut.

Adapun berdasarkan Rencana Jangka Panjang tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Masyarakat yang Maju ditandai dengan adanya perkembangan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan meningkatnya kesejahteraan. Kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan daya beli masyarakat; tingkat layanan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas publik, tingkat layanan penyediaan modal bagi masyarakat.

Masyarakat yang mandiri diukur berdasarkan perubahan Indeks Pembangunan Manusia, yang mencakup: Tingkat Pendidikan Penduduk; Tingkat Partisipasi Sekolah; Daya Serap

Lembaga Pendidikan Formal; Usia Harapan Hidup Penduduk; Lama Hari Sakit Penduduk; Status Gizi Balita; Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana Kesehatan per Penduduk. Berkaitan dengan derajat otonomi fiskal, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah, derajat otonomi fiskal diukur berdasarkan perubahan Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi dan kontribusi penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah dan penerimaan yang berasal dari pemerintah Propinsi dan Pusat.

3.2.2. Misi

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka dirumuskan 5 (lima) misi yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Misi Pertama :

“ Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berdaya saing”.

Mewujudkan suatu kondisi masyarakat baik secara kolektif maupun individual memiliki wawasan yang luas, cara berfikir komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan

Misi Kedua :

“Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan”.

Berdasarkan misi kedua WakilKota dan Wakil Walikota Bima terpilih ada 2 (dua) point yang perhatikan :

1. Adanya peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat secara signifikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat disertai dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. selain itu juga dengan memberikan keberpihakan/afirmatif dalam peningkatan ekonomi khususnya kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal.
2. Peningkatan ekonomi masyarakat akan berbasis pada potensi produk unggulan yang ada di Kota Bima baik di sektor pertanian maupun non pertanian, yang pada pengembangannya dapat memberikan lapangan kerja baru dan nilai tambah ekonomi;

Misi Ketiga :

“Menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik”.

Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pelaksanaan tahapan-tahapan reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan Efektifitas capaian hasil pembangunan, Efisiensi dalam proses

penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta membuka ruang Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Misi Keempat :

“Mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah, melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan yang terintegrasi”.

Terwujudnya lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.

Sehubungan dengan wilayah administrasi Kota Bima yang masih memiliki potensi terjadinya bencana terutama bencana banjir, maka Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan akan difokuskan terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana.

Misi Kelima :

“Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan agamis”.

Terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan dan ketqwaan yang baik, mematuhi aturan hukum negara dan agama, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama serta memiliki karakter individu dan komunitas yang bercirikan nilai agama melalui pemahaman dan pengamalan yang benar dan baik.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berikut disajikan beberapa isu strategis Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023, sebelum memasukan aspek politis dari kepala dan wakil kepala daerah terpilih.

1. Mutu dan Daya Saing Luaran Pendidikan Belum Optimal
 - a. Rata-rata lama sekolah masih rendah
 - b. Masih banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang terakreditasi C atau belum terakreditasi
 - c. Pendidikan Kejuruan dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri belum sesuai
 - d. Relatif rendahnya nilai evaluasi atas mutu guru yang ditunjukkan nilai UKG, mutu lulusan melalui nilai UN
 - e. Penyebaran tenaga pendidikan belum merata, sehingga rasio guru murid tidak merata antar daerah

- f. Cukup tingginya angka buta huruf dewasa
 - g. Akses Pendidikan yang belum merata
 - h. Fasilitasi aksesibilitas ke pendidikan tinggi dalam dan luar negeri masih rendah
2. Derajat Kesehatan Masyarakat Relatif Rendah
- a. Angka harapan hidup saat lahir masih relatif rendah
 - b. Angka kematian ibu, bayi dan balita relatif masih tinggi
 - c. Tingginya prevalensi kurang gizi dan *stunting*
 - d. Belum meratanya fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan terstandar
 - e. Belum meratanya SDM kesehatan antar daerah
 - f. Akses terhadap layanan kesehatan belum optimal
 - g. Upaya promotif dan preventif masalah kesehatan belum optimal
 - h. Masih relatif mudanya usia kawin pertama perempuan <21 tahun
3. Tingkat Kemiskinan masih di atas rata-rata nasional
- a. Kedalaman kemiskinan masih relatif tinggi
 - b. Angka Setengah Pengangguran yang cukup tinggi
 - c. Koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan belum optimal
 - d. Kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja memiliki pendidikan, keterampilan, serta sikap mental relatif rendah
 - e. Belum meratanya masyarakat miskin mendapatkan jaminan sosial
 - f. Infrastruktur dasar masih terbatas (akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, dan rumah layak huni)
 - g. Masih ada desa yang masuk dalam kategori rawan pangan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Belum Berjalan Optimal
- a. Belum optimalnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil
 - b. Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah
 - c. Penataan dan pengembangan SDM aparatur belum optimal
 - d. Masih relatif rendahnya indeks kepuasan masyarakat
 - e. Level maturitas pengendalian internal pemerintah belum baik
 - f. Penerapan *Good Governance* yang didukung teknologi informasi belum optimal
 - g. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi dalam pembangunan
 - h. Belum optimalnya proses fasilitasi pengurusan perizinan

5. Partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ketahanan keluarga belum optimal
 - a. Pembangunan manusia berbasis gender masih di bawah nilai capaian nasional
 - b. Peran serta perempuan dalam politik dan ekonomi masih relatif rendah
 - c. Kekerasan kepada perempuan dan anak masih cukup banyak
6. Pertumbuhan ekonomi relatif stagnan
 - a. Penanganan sektor pertanian secara komprehensif belum optimal
 - b. Pertumbuhan ekonomi masih tergantung kepada sektor pertambangan
 - c. Masih defisitnya nilai perdagangan, impor masih lebih tinggi dari nilai ekspor
 - d. Rendahnya realisasi investasi diluar sektor pertambangan dan pariwisata
 - e. Pengaruh sektor pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian masyarakat
 - f. Masih minimnya akses masyarakat terhadap produk dan pendidikan keuangan
 - g. Peranan koperasi, koperasi syariah, BUMDes dalam perekonomian relatif rendah
 - h. Wirausaha yang produktif dan inovatif masih kurang
 - i. Terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi yang murah dan berkelanjutan
 - j. Potensi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil belum dikelola secara optimal
 - k. Lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal
7. Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal
 - a. Penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas belum optimal
 - b. Konektivitas sektor hulu (produksi) dan sektor hilir (pengolahan dan perdagangan) belum optimal
 - c. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal
 - d. Industri pengolahan dan industri pendukung komoditas masih kurang
 - e. Fasilitasi dan pemanfaatan hasil karya industri lokal belum optimal
 - f. Infrastruktur, perizinan dan investasi industri belum difasilitasi secara khusus dan optimal
8. Belum Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang aman dan damai secara optimal.
 - a. Indeks Demokrasi masih rendah
 - b. Beberapa daerah masih masuk dalam kawasan rawan konflik sosial

- c. Nilai agama, budaya dan kearifan lokal belum diimplemetasikan dalam kehidupan secara optimal
 - d. Angka kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA masih tinggi
 - e. Potensi bencana relatif tinggi
9. Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan belum optimal
- a. Indeks kualitas lingkungan hidup semakin menurun
 - b. Penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan penegakan hukum) belum optimal
 - c. Terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut
 - d. Penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal sumberdaya alam (*illegal logging, illegal fishing, illegal mining*) masih lemah
10. Penataan Ruang, konektivitas, dan ketersediaan Infrastruktur Wilayah belum optimal
- a. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal
 - b. Tingkat kemantapan jalan yang tinggi belum diimbangi dengan tingkat kenyamanan dan standar pelayanan memadai
 - c. Aksesibilitas, kualitas, dan kelancaran transportasi masal antar pusat pertumbuhan dan pulau-pulau kecil belum merata
 - d. Sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi belum merata
 - e. Potensi energi baru dan terbarukan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri belum dikelola secara optimal
 - f. Ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan belum merata
 - g. Ketersediaan dan sistem pengelolaan air minum regional belum terintegrasi

Tabel 1. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bima sesuai dengan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berdaya saing.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup
			Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah
				Angka harapan lama sekolah
				Rata-rata nilai UN
				Angka kelulusan
			Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Rp)
Meningkatnya ketahanan pangan	Cadangan pangan (ton)			
	Skor pola pangan harapan			
Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan	Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	Indeks Williamson	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	PDRB (%)
			Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah	Gini rasio
			Meningkatnya produktifitas sector pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa serta industry kreatif	PDRB sector pertanian
				Jumlah kunjungan wisata (orang)
				Spending of money wisatawan
				PDRB sector perdagangan (juta)
				PDRB sector jasa
	PDRB sector industry			
	Meningkatkan kesejahteraan social masyarakat	Angka kemiskinan	Berkurangnya angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani (%)
			Meningkatnya kesempatan kerja	Partisipasi angkatan kerja
Angka pengangguran terbuka				
Menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP
				Skor LPPD
				Opini BPK
			Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	% PAD terhadap APBD
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor IKM

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	
Mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah, melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan yang terintegrasi dengan pengurangan resiko bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	
				Persentase luas RTH	
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	
	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	Persentase luas kawasan permukiman layak	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Luas kawasan kumuh (%)
					Persentase rumah layak huni
					Persentase rumah tangga berakses air minum layak
		Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase kemandapan jalan dan jembatan		
			Indeks konektivitas transportasi		
		Indeks ketangguhan bencana	Berkurangnya resiko bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana	
Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan agamais	Meningkatkan masyarakat yang tentram, bermoral dan agamais	Indeks ketentraman (angka konflik)	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban	Angka kriminalitas yang tertangani	
			Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya local	Cakupan nilai budaya, adat dan tradisi yang lestari (%)	
			Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan wilayah Kota Bima didasarkan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031. Terdapat 6 (enam) substansi dalam RTRW Kota Bima, yaitu 1) Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah; 2) Rencana struktur ruang wilayah; 3) Rencana pola ruang wilayah; 4) Penetapan kawasan strategis; 5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan 6) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Dari 6 (enam) substansi tersebut, substansi yang berimplikasi langsung terhadap pengembangan wilayah adalah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah; rencana struktur ruang wilayah; rencana pola ruang wilayah; dan penetapan kawasan strategis kota.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Bima ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Berdasarkan RTRW Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Bima merupakan simpul dari pertumbuhan Pulau Sumbawa bagian Timur yang memiliki *hinterland* wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bima adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam rangka mendorong perkembangan wilayah kota sebagai kawasan perdagangan dan jasa, serta pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bima

No.	Kebijakan	Startegi
(1)	(2)	(3)
1.	penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara merata sesuai dengan hirarki pelayanannya;	mengembangkan pusat pelayanan yang sudah ada dan membentuk pusat pelayanan baru dalam rangka pemerataan pelayanan dan peningkatan pemanfaatan potensi wilayah kota;
		mengembangkan fasilitas-fasilitas perkotaan secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan, daya dukung, dan daya tampung kawasan;
		mengembangkan sistem transportasi secara

No.	Kebijakan	Startegi
(1)	(2)	(3)
		berjenjang yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota serta sistem jaringan prasarana kota lainnya
		mengembangkan sub pusat pelayanan kota yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung
2.	pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur lintas wilayah dalam sistem perkotaan wilayah kota, wilayah provinsi, dan nasional;	meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, sistem jaringan jalan provinsi, dan sistem jaringan jalan kota, termasuk didalamnya membangun jalan lingkaran luar Selatan dan lingkaran luar Utara (outer ring road) untuk mendistribusikan pergerakan eksternal;
		mengembangkan integrasi sistem prasarana terpadu antar wilayah dan perkotaan terdiri atas sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, serta jalur evakuasi bencana secara terpadu dengan berbasis kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat
		meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang terpadu antara jaringan jalan, jalur pedestrian, jalur evakuasi bencana dan transportasi massal yang berbasis moda jalan
		memelihara, merehabilitasi serta membangun sistem jaringan transportasi dan infrastruktur wilayah untuk mendukung fungsi kawasan dan fungsi pelayanan kota
3.	peningkatan kualitas pelayanan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah serta fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan secara optimal;	mengembangkan sistem jaringan jalan terpadu di dalam kota yang terintegrasi dengan jaringan jalan antar wilayah dan antar sistem pusat pelayanan
		mengembangkan sistem pelayanan

No.	Kebijakan	Startegi
(1)	(2)	(3)
		angkutan umum massal terpadu
		membuka jaringan-jaringan jalan baru sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antara pusat pelayanan kota dengan sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan serta antar kawasan di dalam wilayah kota dan antar wilayah
		meningkatkan pengawasan dan pengelolaan kawasan pesisir serta pembangunan kota tepian air (water front city
		merestrukturisasi pola grid pada jalan utama kota sesuai dengan morfologi kota
		mengembangkan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan dan/atau persimpangan
		meningkatkan kualitas perlengkapan jalan untuk mendukung kelancaran pergerakan; d
		mengembangkan dan memantapkan tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran pada Pelabuhan Bima sebagai pelabuhan rakyat maupun pelabuhan bongkar muat dan meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarananya
4.	pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana;	Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana meliputi meningkatkan kualitas dan jangkauan sarana dan prasarana kota
5.	pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkesinambungan dan mendukung perkembangan wilayah kota	menetapkan komponen-komponen kawasan lindung kota
		memadukan arahan kawasan lindung provinsi dalam kawasan lindung kota

No.	Kebijakan	Startegi
(1)	(2)	(3)
		memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung sebagai bagian dari RTH
		menyediakan kawasan sempadan pantai sejauh 30 - 100 (tiga puluh sampai dengan seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat
		memberikan perlindungan dan penyangga kanan-kiri sempadan sungai;
		melibatkan semua lapisan masyarakat dalam memelihara kawasan lindung
6.	pengecahan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup akibat dari pemanfaatan ruang	mengendalikan pemanfaatan alam dan buatan pada kawasan lindung;
		mengendalikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan perumahan penduduk secara bertahap ke luar kawasan lindung
		menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung.
7.	penetapan kawasan ruang terbuka hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota	penetapan kawasan ruang terbuka hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota
		penetapan kawasan ruang terbuka hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota
		penetapan kawasan ruang terbuka hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota
		penetapan kawasan ruang terbuka hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota
		penetapan kawasan ruang terbuka hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota

No.	Kebijakan	Startegi
(1)	(2)	(3)
8.	perlindungan kawasan cagar budaya dan aktifitas yang memiliki nilai historis dan spiritual;	melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya, bangunan bersejarah, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah
		revitalisasi kawasan-kawasan yang mendukung pencitraan kota berwawasan budaya loka
		merehabilitasi kawasan cagar budaya yang telah mengalami kerusakan;
		melarang kegiatan-kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan cagar budaya
9.	pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana;	menetapkan ruang yang memiliki potensi rawan bencana
		mengendalikan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;
		menyiapkan jalur-jalur dan ruang evakuasi bencana;
		mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah kota secara terpadu
		meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta dan masyarakat tentang bahaya bencana serta upaya antisipasi terjadinya bencana
		memprioritaskan upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan perumahan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi perkotaan
		mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan rawan bencana alam
10.	pengembangan kawasan budidaya	pengembangan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan sektor informal, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, 16 kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan perikanan dan kawasan pertambangan.
11.	pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung	meningkatkan kualitas kawasan perumahan perkotaan

No.	Kebijakan	Startegi
(1)	(2)	(3)
	lingkungan	
		menata kawasan padat dan/atau kumuh di wilayah perkotaan;
		mengembangkan sarana dan prasarana perumahan;
		mengatur dan menata kembali perumahan di sepanjang sempadan sungai
12.	pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di wilayah kota	menata dan merevitalisasi kawasan perdagangan dan jasa;
		mengembangkan super blok sebagai pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional, dan local
		memberikan ruang yang memadai untuk menampung aktifitas pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian maupun kawasan perdagangan skala besar
		menyediakan ruang parkir yang memadai di setiap kawasan perdagangan

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun isu-isu strategis pembangunan Kota Bima yang perlu menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kualitas dan Daya Saing Masyarakat yang Perlu Ditingkatkan

Tolak ukur penting dalam memotret pembangunan sumber daya manusia adalah tercermin dari tingkat kesehatan, pendidikan dan pendapatan penduduk. Isu Strategis pada Bidang kesehatan meliputi:

- Kasus gizi buruk.
- Kesehatan Ibu hamil
- Kesehatan Ibu melahirkan

- Kesehatan Bayi
- Stunting
- Kualitas pelayanan berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, keterbatasan dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang berkompeten.
- Jangkauan pelayanan kesehatan oleh karena belum seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan BPJS
- Ketersediaan Rumah Sakit Rujukan
- Penyehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat
- Tata kelola layanan lembaga kesehatan

Isu Strategis pada bidang Pendidikan meliputi:

- Keterjangkauan pelayanan pendidikan yang berkaitan dengan akses dan pembiayaan
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Penuntasan pendidikan dasar
- Kualitas pendidikan mencakup tenaga pendidik yang berkualitas, materi dan metode pembelajaran, sarana dan prasarana serta prestasi anak didik.
- Tata kelola layanan lembaga pendidikan

b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan harus dipandang sebagai kondisi yang tidak saja berkaitan dengan ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar, perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Adapun isu strategis terkait dengan kemiskinan dan pengangguran meliputi:

- Akses terhadap sumber daya: modal, asset, teknologi
- Akses terhadap pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, rumah layak, air bersih, sanitasi layak
- Rehabilitasi sosial dasar dan perlindungan terhadap kelompok disabilitas, anak telantar dan kelompok usia lanjut
- Tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan
- Kebijakan dan integrasi program *pro poor*
- Lapangan kerja dan kesempatan berusaha
- Kualitas tenaga kerja

Pada aspek pembangunan ekonomi, meskipun menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya, sektor-sektor unggulan dan produktif belum berkembang dan memberikan nilai tambah secara optimal pada pendapatan masyarakat. Sektor pariwisata maupun industri kreatif pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan mengingat kekayaan budaya maupun komoditi produk unggulan yang kita miliki. Isu strategis terkait dengan pembangunan ekonomi mencakup:

- Pengembangan Industri Kecil Menengah
- Pemberdayaan UMKM
- Peningkatan produk unggulan daerah
- Ketahanan pangan
- Pembentukan sentra-sentra ekonomi dan pembangunan kawasan strategis
- Pengembangan jaringan pemasaran

c. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Isu tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bima mencakup:

- Perencanaan kinerja yang berkualitas,
- Kualitas pengawasan dan kapabilitas APIP
- Akuntabilitas kinerja dan keuangan
- Peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN
- Peningkatan kualitas pelayanan publik (perijinan, administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan).
- Pengelolaan keuangan yang efisien, tertib dan akuntabel
- Keterbukaan Informasi Publik
- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pengawasan

d. Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Penataan Ruang yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana

Isu strategis pada aspek ini meliputi:

- Kemantapan jalan dan jembatan
- Pelayanan Air bersih
- Rumah tidak layak huni
- Kawasan kumuh
- Kesenjangan pembangunan wilayah timur dan barat
- Ketaatan terhadap RTRW dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang

- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Pelayanan informasi rawan bencana
- Ketangguhan wilayah terhadap resiko bencana

e. Eksistensi Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais.

Pembangunan masyarakat berkarakter berkaitan erat dengan penerapan tradisi dan budaya serta kearifan lokal di Kota Bima. Falsafah hidup masyarakat Bima yang sampai saat ini bahkan telah menjadi motto pemerintah Kota Bima yaitu ***Maja Labo Dahu***. Falsafah hidup ini selalu menjadi nasehat atau amanat orang-orang tua terhadap anak-anaknya yang pergi merantau ke luar daerah. *Maja Labo Dahu* diartikan sebagai Malu dan Takut (*Maja* = Malu; *Dahu* = Takut). Merujuk pada kitab BO kesultanan Bima, *maja labo dahu* berarti malu untuk berbuat hal-hal yang diluar batas norma susila dan takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Isu strategis terkait dengan pembangunan masyarakat berkarakter dan agamais meliputi:

- Implementasi nilai-nilai *Maja Labo Dahu*
- Pelestarian dan revitalisasi nilai-nilai tradisi, adat budaya maupun benda cagar budaya
- Implementasi nilai-nilai dan pendidikan keagamaan dalam kehidupan masyarakat
- Peran petugas keagamaan dan lembaga keagamaan
- Pusat kebudayaan islam dan *Islamic Centre*
- Penyalahgunaan Narkoba
- Tindakan kriminalitas

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri				
No	Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan	Rendahnya daya saing obyek wisata	Obyek wisata belum ditata secara baik	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
			Akses menuju obyek wisata belum seluruhnya baik	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
			Kebersihan lingkungan obyek wisata masih sangat kurang	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
			Sarana dan prasarana obyek wisata masih sangat minim	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
			Keamanan dan ketertiban	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Rendahnya upaya promosi pariwisata	Masih kurangnya kerjasama pengembangan pariwisata	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Organisasi pemuda yang aktif masih minim	Festival dan atraksi pendukung pariwisata masih kurang	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
			Pembinaan dan pendampingan	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Jumlah wirausaha muda sangat minim	Pembinaan dan penguatan modal	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Pembinaan olahraga usia dini masih sangat minim	Kurangnya kompetisi antar sekolah dan usia dini	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Sudah tersedia tapi masih terbatas	Pelatihan dan uji sertifikasi	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Atlet berprestasi internasional	Pembinaan usia muda	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Bidang atletik dan volley pantai sudah berprestasi nasional dan internasional	Pembinaan usia muda	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi

Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Sosialisasi RTRW	Belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh	Anggaran dan mekanisme	Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang
2.	Pelayanan data dan informasi	Belum optimal untuk bahan perencanaan	Anggaran dan sumber daya manusia	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
3.	Pengendalian penataan ruang	Badan koordinasi penataan ruang daerah belum optimal dilaksanakan	Peraturan perundangan kepala daerah belum direvisi	Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang
4.	Evaluasi pemanfaatan ruang	Belum dilaksanakan secara optimal dan masih bersifat parsial	Anggaran	Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Pertumbuhan ekonomi relatif stagnan	Rendahnya realisasi investasi diluar sektor pertambangan dan pariwisata	Anggaran dan mekanisme	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Pengaruh sektor pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian masyarakat	Anggaran dan sumber daya manusia yang masih kurang	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
2.	Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal	Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal	Anggaran dan pelaku industri belum maksimal	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Industri pengolahan dan industri pendukung komoditas masih kurang	Belum melakukan tatakelola yang baik	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Fasilitasi dan pemanfaatan hasil karya industri lokal belum optimal	Masih kurang melaksanakan promosi	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota maka telah ditentukan tujuan untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari setiap misi, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik hasil-hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan tersebut adalah:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke...				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan produktifitas sektor pariwisata	Rata - rata pengeluaran wisatawan	Rp.1.005.000,-	Meningkatnya kunjungan wisatawan	PDRB sektor pariwisata	10	10	10	10	10
					persentase peningkatan kunjungan wisatawan	35	35	35	35	35
				Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase cabor yang meraih medali di tingkat propinsi dan nasional	25	25	30	30	35

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

5.1.1. Strategi

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas Pemerintahan, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup : (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis sumber daya daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah, mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Untuk menentukan strategi, dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dengan memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang. Selanjutnya strategi yang telah ditentukan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan yang akan mendukung tercapainya sasaran yang diinginkan.

Secara umum strategi dipetakan kedalam empat perspektif yaitu perspektif masyarakat/layanan, perspektif internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan.

1. **Perspektif Masyarakat/Layanan:** bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, dan pemangku

kepentingan lainnya. Jenis strategi antara lain sosialisasi, konsolidasi, konsultasi, negosiasi, mediasi, promosi, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, mobilisasi

2. **Perspektif Proses Internal:** strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*). Jenis strategi antara lain koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, sinergi.
3. **Perspektif Kelembagaan:** strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang. Jenis strategi antara lain rasionalisasi, revitalisasi, restrukturisasi, reorganisasi, rekonstruksi, akreditasi, reposisi, ratifikasi, desentralisasi.
4. **Perspektif Keuangan:** strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*). Jenis strategi antara lain investasi, divestasi, mobilisasi deregulasi.

Tabel 5.1.
Strategi Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan produktifitas sektor pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Peningkatan daya tarik wisata
		Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga

5.1.2. Arah Kebijakan

Strategi yang sudah dirumuskan sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya, lebih lanjut dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, Namun demikian pada permasalahan-permasalahan tertentu tidak diberlakukan penekanan yang berbeda pada setiap tahunnya disebabkan oleh pelaksanaannya harus dilakukan secara berkelanjutan.

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan produktifitas sektor pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Peningkatan daya tarik wisata	Peningkatan sarana dan prasarana dan revitalisasi serta penataan kawasan destinasi wisata	Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata	Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata	Mengembangkan atraksi budaya dan ekonomi kreatif pendukung pariwisata	Meningkatkan kerjasama dan promosi pariwisata
		Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Meningkatkan peran pemuda dalam wirausaha, pembinaan atlet muda, cabang olahraga serta jumlah prestasi olahraga dan pelatih yang bersertifikasi yang diraih	Meningkatkan peran pemuda dalam wirausaha, pembinaan atlet muda, cabang olahraga serta jumlah prestasi olahraga dan pelatih yang bersertifikasi yang diraih	Meningkatkan peran pemuda dalam wirausaha, pembinaan atlet muda, cabang olahraga serta jumlah prestasi olahraga dan pelatih yang bersertifikasi yang diraih	Meningkatkan peran pemuda dalam wirausaha, pembinaan atlet muda, cabang olahraga serta jumlah prestasi olahraga dan pelatih yang bersertifikasi yang diraih	Meningkatkan peran pemuda dalam wirausaha, pembinaan atlet muda, cabang olahraga serta jumlah prestasi olahraga dan pelatih yang bersertifikasi yang diraih

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan 5 (lima) urusan pilihan, dan 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

Secara rinci kerangka pendanaan dan program perangkat daerah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 6.1. berikut ini.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Bima

(jutaan rupiah)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran program dan kegiatan	Data capaian pd thn awal perenca naan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		Unit kerja perangkat Daerah penanggu ng jawab	Loka si
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						targ et	Rp.	target	Rp.	targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan produktifitas sektor pariwisata	Rata-rata pengeluaran wisatawan	15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase pelaksanaan promosi pemasaran industri pariwisata	25%	25%	1.405	25%	1.500	25%	1.550	25%	1.600	25%	1.625	25%	1.625	Kabid pemasaran pariwisata & ekonomi kreatif	Kota Bima
		15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Jumlah kerjasama teknologi informasi wisatawan	3 media	3 media	0	3 media	300	3 media	330	3 media	363	3 media	399	3 media	399	Kasi kerjasama pariwisata	Kota Bima
		15.03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah kerjasama promosi wisatawan	3 kali	3 kali	4	3 kali	210	3 kali	231	3 kali	254	3 kali	279	3 kali	279	Kasi kerjasama pariwisata	Kota Bima
		15.04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Jumlah pelaksanaan koordinasi antara sector	4 kali	4 kali	50	4 kali	150	4 kali	165	4 kali	181	4 kali	199	4 kali	199	Kasi penguatan strategi pemasaran & promosi	Kota Bima
		15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di	Jumlah media promosi	3 media	3 media	376	3 media	1.000	3 media	1.100	3 media	1.210	3 media	1.331	3 media	1.331	Kasi penguatan strategi pemasaran & promosi	Kota Bima

			luar negeri																
		15.06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	jumlah evaluasi pelaksanaan	4 kali	4 kali	0	4 kali	50	4 kali	55	4 kali	60	4 kali	66	4 kali	66	Kasi penguatan strategi pemasaran & promosi	Kota Bima
		15.10	MICE	Jumlah laporan kegiatan	1 keg.	1 keg.	183	1 keg.	300	1 keg.	330	1 keg.	363	1 keg.	399	1 keg.	399	Kasi penguatan strategi pemasaran & promosi	Kota Bima
		15.11	Partisipasi Pelestarian dan Aktualisasi Atraksi Wisata Budaya	Jumlah partisipasi pelestarian dan aktualisasi atraksi wisata budaya	2 keg.	2 keg.	789	2 keg.	2.000	2 keg.	2.200	2 keg.	2.420	2 keg.	2.662	2 keg.	2.662	Kasi penguatan strategi pemasaran & promosi	Kota Bima
		15.12	Fasilitasi dan Kerjasama Penyelenggaraan Festival Atraksi Kesenian Tradisional	Jumlah festival atraksi kesenian tradisional	1 keg.	1 keg.	244	1 keg.	1.000	1 keg.	1.100	1 keg.	1.210	1 keg.	1.331	1 keg.	1.331	Kasi kerjasama pariwisata	Kota Bima
		20	Program pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif	Jumlah ekonomi kreatif	1.016 ush	1.016 ush	200	1.016 ush	225	1.050 ush	250	1.075 ush	300	1.100 ush	350	1.100 ush	350	Kabid pemasaran pariwisata & ekonomi kreatif	Kota Bima
		20.01	Penyusunan data base ekonomi kreatif	Jumlah data base ekonomi kreatif	1 dok.	1 dok.	111	1 dok.	37	1 dok.	41	1 dok.	45	1 dok.	49	1 dok.	49	Kasi ekonomi kreatif	Kota Bima

		20.02	Car free day	Jumlah kegiatan	4 keg.	4 keg.	57	4 keg.	108	4 keg.	119	4 keg.	130	4 keg.	144	4 keg.	144	Kasi ekonomi kreatif	Kota Bima
		20.03	Event ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan	7 keg.	7 keg.	0	7 keg.	350	7 keg.	385	7 keg.	423	7 keg.	465	7 keg.	465	Kasi ekonomi kreatif	Kota Bima
		20.04	Pameran / gebiar ekonomi kreatif	Jumlah karya yang dipamerkan	1 keg.	1 keg.	0	1 keg.	250	1 keg.	275	1 keg.	302	1 keg.	332	1 keg.	332	Kasi ekonomi kreatif	Kota Bima
		20.05	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi kreatif	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif	5 unit	5 unit	0	5 unit	1.000	5 unit	1.100	5 unit	1.210	5 unit	1.331	5 unit	1.331	Kasi ekonomi kreatif	Kota Bima
		20.06	Pelatihan ekonomi kreatif	Jumlah peserta pelatihan	60 org	60 org	0	60 org	300	60 org	330	60 org	363	60 org	399	60 org	399	Kasi ekonomi kreatif	Kota Bima
		20.07	Khasanah ramadhan	Jumlah karya yang dipasarkan	1 keg.	1 keg.	0	1 keg.	200	1 keg.	220	1 keg.	242	1 keg.	266	1 keg.	266	Kasi ekonomi kreatif	Kota Bima
		20.08	Forum grup diskusi (FGD) ekonomi kreatif	Jumlah peserta diskusi	6 keg.	6 keg.	0	6 keg.	150	6 keg.	165	6 keg.	181	6 keg.	199	6 keg.	199	Kasi ekonomi kreatif	Kota Bima
		16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase pengembangan destinasi ODTW	50%	50%	5.119	50%	5.500	50%	6.000	55%	6.500	55%	7.000	55%	7.000	Kabid pengembangan destinasi	Kota Bima
		16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana prasarana pariwisata	3 lokasi	3 lokasi	571	3 lokasi	2.500	3 lokasi	2.750	3 lokasi	3.025	3 lokasi	3.327	3 lokasi	3.327	Kasi pengembangan destinasi & ODTW	Kota Bima
		16.04	Pelaksanaan koordinasi	Jumlah Laporan	1 dok	1 dok	15	1 dok	100	1 dok	110	1 dok	121	1 dok	133	1 dok	133	Kasi pengemba	Kota Bima

			pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Kegiatan														ngan destinasi & ODTW	
		16.08	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	8 gedung	8 gedung	2.493	8 gedung	2.000	8 gedung	2.200	8 gedung	2.420	8 gedung	2.662	8 gedung	2.662	Kasi pengembangan destinasi & ODTW	Kota Bima
		16.09	Pendataan dan Perencanaan Site, Destinasi, ODTW dan Kawasan Pariwisata	Database Pariwisata	1 dok	1 dok	0	1 dok	100	1 dok	110	1 dok	121	1 dok	133	1 dok	133	Kasi pemel, pengelolaan destinasi & ODTW	Kota Bima
		16.10	Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Atraksi, Destinasi dan ODTW	Jumlah kegiatan pemeliharaan atraksi, destinasi dan ODTW	3 keg.	3 keg.	71	3 keg.	120	3 keg.	132	3 keg.	145	3 keg.	159	3 keg.	159	Kasi pemel, pengelolaan destinasi & ODTW	Kota Bima
		16.11	Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Pemeliharaan dan Pengelolaan Destinasi dan ODTW	Jumlah koordinasi di sektor pariwisata, pengelolaan destinasi dan ODTW	4 kali	4 kali	13	4 kali	100	4 kali	110	4 kali	121	4 kali	133	4 kali	133	Kasi pemel, pengelolaan destinasi & ODTW	Kota Bima
		16.12	Pengelolaan Atraksi, Destinasi dan ODTW	Jumlah kunjungan wisatawan	44123 org	44123 org	87	45291 org	150	47472 org	165	52731 org	181	57671 org	199	57671 org	199	Kasi pemel, pengelolaan destinasi & ODTW	Kota Bima
		16.13	MONEV Perencanaan dan	Jumlah monitoring dan evaluasi	4 kali	4 kali	70	4 kali	77	4 kali	85	4 kali	94	4 kali	103	4 kali	103	Kasi pengendalian	Kota Bima

			Pembangunan Destinasi, ODTW dan Kawasan	pembangunan destinasi ODTW														destinasi & ODTW	
		16.14	Pembangunan sarana penunjang dan utilitas	Jumlah pembangunan sarana penunjang dan utilitas pariwisata	8 keg.	8 keg.	0	8 keg.	1.500	8 keg.	1.650	8 keg.	1.815	8 keg.	1.996	8 keg.	1.996	Kasi pemel, pengelolaan destinasi & ODTW	Kota Bima
		16.15	Kerjasama peningkatan SDM pengelola Kawasan, Destinasi dan ODTW serta atraksi dengan instansi dan stakeholders terkait	Jumlah kerjasama dan SDM/Stakeholders pengelola Kawasan, Destinasi, ODTW maupun atraksi	4 keg.	4 keg.	0	4 keg.	200	4 keg.	220	4 keg.	242	4 keg.	266	4 keg.	266	Kasi pemel, pengelolaan destinasi & ODTW	Kota Bima
		17	Program pengembangan industry dan kemitraan pariwisata	Jumlah lembaga pelaku industri pariwisata	10 ush	10 ush	59	10 ush	100	10 ush	150	10 ush	200	10 ush	250	10 ush	250	Kabid pengembangan industry & kelembagaan pariwisata	Kota Bima
		17.01	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Jumlah informasi dan database pariwisata	2 dok	2 dok	8	2 dok	9	2 dok	10	2 dok	11	2 dok	12	2 dok	12	Kasi pengembangan industry pariwisata	Kota Bima
		17.04	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri	Jumlah lembaga pelaku industri pariwisata	2 lbg	2 lbg	32	2 lbg	125	2 lbg	137	2 lbg	151	2 lbg	166	2 lbg	166	Kasi pengembangan industry pariwisata	Kota Bima

			pariwisata dan budaya																
		17.5	Forum grup diskusi (FGD) HPI	Jumlah pelaksanaan forum diskusi	2 kali	2 kali	0	2 kali	50	2 kali	55	2 kali	60	2 kali	66	2 kali	66	Kasi pengembangan industry pariwisata	Kota Bima
		17.06	Penyusunan data base dan program usaha industri jasa pariwisata lembaga dan mitra pariwisata	Jumlah data industri jasa pariwisata	2 dok	2 dok	0	2 dok	50	2 dok	55	2 dok	60	2 dok	66	2 dok	66	Kasi pengembangan industry pariwisata	Kota Bima
		17.08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah pokdarwis	8 klp	8 klp	0	8 klp	55	8 klp	60	8 klp	66	8 klp	73	8 klp	73	Kasi pengembangan industry pariwisata	Kota Bima
		17.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha dan industri jasa pariwisata lembaga dan mitra pariwisata	Jumlah monitoring, evaluasi lembaga serta mitra pariwisata	4 kali	4 kali	17	4 kali	45	4 kali	49	4 kali	54	4 kali	59	4 kali	59	Kasi pengembangan industry pariwisata	Kota Bima
		17.10	Koordinasi Dengan Sektor Pariwisata tentang Pelatihan pemandu wisata	Jumlah pelaksanaan koordinasi antara sektor (Sppd dalam daerah dan Luar daerah)	4 kali	4 kali	0	4 kali	75	4 kali	82	4 kali	90	4 kali	99	4 kali	99	Kasi pengembangan industry pariwisata	Kota Bima
		18	Program pengembang	Jumlah lembaga	10 lokasi	10 lks	552	10 lks	600	10 lks	650	10 lks	700	10 lks	750	10 lks	750	Kabid pengemb	Kota Bim

			an sumber daya manusia kepariwisataan	pelaku industri pariwisata														angan industry & kelembagaan pariwisata	a
		18.01	Pengembangan SDM bidang pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah lembaga pariwisata	5 lbg	5 lbg	0	5 lbg	200	5 lbg	220	5 lbg	242	5 lbg	266	5 lbg	266	Kasi pengembangan SDM	Kota Bima
		18.02	Pengembangan SDM dan BIMTEK profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah kegiatan	6 keg.	6 keg.	552	6 keg.	200	6 keg.	220	6 keg.	242	6 keg.	266	6 keg.	266	Kasi pengembangan SDM	Kota Bima
		19	Program pengembangan dan penguatan kelembagaan pariwisata	Jumlah lembaga kepariwisataan	10 lbg	10 lbg	41	10 lbg	75	10 lbg	100	10 lbg	150	10 lbg	200	10 lbg	200	Kabid pengembangan industry & kelembagaan pariwisata	Kota Bima
		19.03	Penerbitan rekomendasi ijin usaha pariwisata, lembaga kepariwisataan dan rekomendasi ijin pemandu wisata	Jumlah rekomendasi ijin pemandu wisata	10 ijin	10 ijin	0	10 ijin	54	10 ijin	59	10 ijin	65	10 ijin	71	10 ijin	71	Kasi kelembagaan pariwisata	Kota Bima
		19.04	Standarisasi dan sertifikasi segala bentuk usaha dan	Persentase standarisasi bentuk usaha industri jasa	50%	50%	0	50%	75	50%	82	50%	90	50%	99	50%	99	Kasi kelembagaan pariwisata	Kota Bima

			industri jasa pariwisata	pariwisata															
		19.05	Fasilitasi dan pendampingan serta pembentukan kelompok masyarakat dan mitra	Jumlah pokdarwis	10 klp	10 klp	41	10 klp	150	10 klp	165	10 klp	181	10 klp	199	10 klp	199	Kasi kelembagaan pariwisata	Kota Bima
		19.06	Lomba pokdarwis Kota Bima	Jumlah pokdarwis	10 klp	10 klp	0	10 klp	85	10 klp	93	10 klp	102	10 klp	113	10 klp	113	Kasi kelembagaan pariwisata	Kota Bima
		19.07	Studi banding desa wisata	Jumlah dokumen study banding	1 dok	1 dok	0	1 dok	100	1 dok	110	1 dok	121	1 dok	133	1 dok	133	Kasi kelembagaan pariwisata	Kota Bima
		19.08	Pelaksanaan kegiatan festival bersih pantai	Jumlah pantai yang telah bersihkan	2 lokasi	2 lokasi	0	2 lokasi	50	2 lokasi	55	2 lokasi	60	2 lokasi	66	2 lokasi	66	Kasi kelembagaan pariwisata	Kota Bima
		16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	jumlah pemuda pelopor	38 org	38 org	656	38 org	700	38 org	750	38 org	800	38 org	850	38 org	850	Kabid pemuda & olahraga	Kota Bima
		16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	75%	75%	650	75%	720	75%	792	75%	871	75%	958	75%	958	Kasi pembinaan kepemudaan	Kota Bima
		20	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	jumlah cabor yang ikut	47 cbr	47 cbr	159	47 cbr	200	47 cbr	250	47 cbr	300	47 cbr	350	47 cbr	350	Kabid pemuda & olahraga	Kota Bima
		20.02	Pelaksanaan identifikasi dan	Jumlah olahragawan /atletik	20 org	20 org	123	20 org	135	20 org	149	20 org	164	20 org	180	20 org	180	Kasi pembinaan	Kota Bima

			pengembangan olahraga unggulan daerah	unggulan														keolahragaan	
		20.03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah olahragawan /atletik yang kita bina	20 org	20 org	35	20 org	40	20 org	44	20 org	48	20 org	53	20 org	53	Kasi pembinaan keolahragaan	Kota Bima
		20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah cabor yang menjalankan kompetisi secara teratur	5 cabor	5 cabor	0	5 cabor	208	5 cabor	229	5 cabor	252	5 cabor	277	5 cabor	277	Kasi pembinaan keolahragaan	Kota Bima
		21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Porsentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	25%	25%	41	25%	75	25%	1.500	25%	2.000	25%	2.500	25%	2.500	Kabid pemuda & olahraga	Kota Bima
		21.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah gedung olahraga	1 gedung	1 gedung	883	2 gedung	971	1 gedung	1.069	1 gedung	1.175	1 gedung	1.293	1 gedung	1.293	Kasi prasarana & sarana kepemudaan & olahraga	Kota Bima
		21.03	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah gedung olahraga	4 kali	4 kali	17	4 kali	19	4 kali	21	4 kali	23	4 kali	26	4 kali	26	Kasi prasarana & sarana kepemudaan & olahraga	Kota Bima
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	744	100%	750	100%	800	100%	825	100%	850	100%	850	Sekretaris	Kota Bima
		01.01	Penyediaan jasa surat	Jumlah jasa surat	9 org	9	84	9 org	84	9 org	84	9 org	84	9 org	84	9 org	84	Kasubag umum &	Kota Bima

			menyurat	menyurat		org												kepegawai an	
		01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran sumber daya air dan listrik	12 bln	12 bln	21	12 bln	23	12 bln	26	12 bln	28	12 bln	31	12 bln	31	Kasubag umum & kepegawai an	Kota Bima
		01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dispar	10 unit	10 unit	22	10 unit	24	10 unit	27	10 unit	29	10 unit	32	10 unit	32	Kasubag umum & kepegawai an	Kota Bima
		01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	6 org	6 org	45	6 org	49	6 org	54	6 org	60	6 org	66	6 org	66	Kasubag Keuangan	Kota Bima
		01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	42 jenis	42 jenis	54	42 jenis	81	42 jenis	89	42 jenis	98	42 jenis	108	42 jenis	108	Kasubag umum & kepegawai an	Kota Bima
		01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan karcis	100 blok	100 blok	39	100 blok	43	100 blok	47	100 blok	52	100 blok	57	100 blok	57	Kasubag umum & kepegawai an	Kota Bima
		01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor	35 peralatan	35 peralatan	66	35 peralatan	72	35 peralatan	80	35 peralatan	88	35 peralatan	97	35 peralatan	97	Kasubag umum & kepegawai an	Kota Bima
		01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media cetak	4 media	4 media	28	4 media	30	4 media	33	4 media	37	4 media	40	4 media	40	Kasubag umum & kepegawai an	Kota Bima
		01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat	12 kali	12 kali	14	12 kali	15	12 kali	17	12 kali	19	12 kali	21	12 kali	21	Kasubag umum & kepegawai an	Kota Bima
		01.18	Rapat-rapat	Jumlah	12 kali	12 kali	245	12 kali	269	12 kali	296	12 kali	326	12 kali	359	12 kali	359	Kasubag	Kota

			kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		kali				kali		kali		kali		kali		umum & kepegawaian	Bima
		01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 kali	12 kali	0	12 kali	25	12 kali	27	12 kali	30	12 kali	33	12 kali	33	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	80%	80%	79	80%	100	80%	150	80%	200	80%	250	80%	250	Sekretaris	Kota Bima
		02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan	4 unit	4 unit	0	4 unit	100	0	0	0	0	0	0	4 unit	100	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	1 pkt	1 pkt	0	1 pkt	50	0	0	1 pkt	50	0	0	1 pkt	50	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah lokasi	1 lokasi	1 lokasi	10	1 lokasi	11	1 lokasi	12	1 lokasi	13	1 lokasi	15	1 lokasi	15	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dispar	10 unit	10 unit	43	10 unit	47	10 unit	52	10 unit	57	10 unit	63	10 unit	63	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor	25 peralatan	25 peralatan	21	25 peralatan	23	25 peralatan	25	25 peralatan	28	25 peralatan	30	25 peralatan	30	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah disiplin aparatur	1 thn	1 thn	0	1 thn	50	1 thn	75	1 thn	100	1 thn	125	1 thn	125	Sekretaris	Kota Bima

		03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah kegiatan	1 keg.	1 keg.	0	1 keg.	37	1 keg.	41	1 keg.	45	1 keg.	49	1 keg.	49	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	1 kali	1 kali	0	1 kali	50	1 kali	75	1 kali	100	1 kali	125	1 kali	125	Sekretaris	Kota Bima
		05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah kegiatan	4 kali	4 kali	0	4 kali	50	4 kali	55	4 kali	60	4 kali	66	4 kali	66	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		05.05	Penyusunan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	0	1 kali	60	1 kali	66	1 kali	72	1 kali	79	1 kali	79	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		05.06	Konsultasi dan Studi Banding	Jumlah konsultasi dilaksanakan	4 kali	4 kali	0	4 kali	75	4 kali	82	4 kali	90	4 kali	99	4 kali	99	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	205	100%	225	100%	250	100%	275	100%	300	100%	300	Sekretaris	Kota Bima
		06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang harus disediakan	4 dok	4 dok	69	4 dok	76	4 dok	83	4 dok	92	4 dok	101	4 dok	101	Kasubag keuangan	Kota Bima
		06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan semester	2 dok	2 dok	45	2 dok	49	2 dok	54	2 dok	60	2 dok	66	2 dok	66	Kasubag keuangan	Kota Bima

		06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 dok	1 dok	14	1 dok	15	1 dok	17	1 dok	18	1 dok	20	1 dok	20	Kasubag keuangan	Kota Bima
		06.05	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan RKA/DPA satuan kerja	3 dok	3 dok	51	3 dok	56	3 dok	62	3 dok	68	3 dok	75	3 dok	75	Kasubag Perencanaan	Kota Bima
		06.06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 dok	3 dok	39	3 dok	43	3 dok	47	3 dok	52	3 dok	57	3 dok	57	Kasubag Perencanaan	Kota Bima

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja daerah memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2018-2023. Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Indikator Kinerja Utama disajikan pada tabel 7.1, dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan pada tabel 7.2.

Table tersebut diatas tertuang pada lampiran berikut.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Bima

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Target					Kondisi Akhir (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	PDRB sektor pariwisata	10	10	10	10	10	10	10
2.	persentase peningkatan kunjungan wisatawan	35	35	35	35	35	35	35
3.	Persentase cabor yang meraih medali di tingkat propinsi dan nasional	25	25	25	30	30	35	35

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Wajib								
13	Kepemudaan dan Olah Raga							
13.1	Persentase cabor yang meraih medali di tingkat propinsi dan nasional	25	25	25	30	30	35	35
Layanan Urusan Pilihan								
1	Pariwisata							
1.1	PDRB sektor pariwisata	10	10	10	10	10	10	10
1.2	persentase peningkatan kunjungan wisatawan	35	35	35	35	35	35	35

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Bima Tahun 2018-2023 ini merupakan rencana kerja lima tahunan yang disusun untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih masa periode 2018-2023.

Rencana strategis Dinas Pariwisata Kota Bima merupakan bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Kota Bima, APBD Propinsi dan APBN, yang diimplemetasikan dalam program dan kegiatan pelaksanaan selama lima tahun kedepan.

Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Bima lima tahunan ini, maka akan merefleksikan rencana strategis prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bima melalui Dinas Pariwisata Kota Bima, sehingga diharapkan akan lebih terkoordinir, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bima, Pemerintah Propinsi dan Kementerian/Lembaga.

Plt. Kepala Dinas
Pariwisata Kota Bima,

SUNARTI, S.Sos.,M.M.
Nip: 19620706 198602 2 007

